



Politik Indonesia Masa Kepemimpinan Soekarno

Alvindi Mochammad Raka Feyandi¹, Fahmi Rizqi Fauzi², Noufal Muhamad Nugraha³

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia

¹*rakaalvindi@gmail.com, ²rizqif031@gmail.com, ³noufal.m.n@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika politik Indonesia selama masa kepemimpinan Soekarno, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi politik di Indonesia selama pemerintahan Soekarno, termasuk peristiwa-peristiwa penting, kebijakan-kebijakan yang diterapkan, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh pemerintahannya. Masa kepemimpinan Soekarno ditandai dengan periode transisi dari penjajahan Belanda menuju kemerdekaan penuh, di mana Soekarno memainkan peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana Soekarno merumuskan dan menerapkan ideologi politiknya, terutama dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), serta bagaimana ia berupaya menjaga stabilitas politik di tengah tekanan domestik dan internasional.

Kata Kunci: Soekarno, politik, Indonesia.

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu politik di Indonesia selalu berubah – ubah dari zaman kerajaan, datangnya bangsa Barat di Indonesia sehingga melakukan kolonialisme, kemudian berlanjut pada era Perang Dunia kedua dan penjajahan Jepang hingga Indonesia yang pada akhirnya Indonesia Merdeka. Politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum sempurna karena masih terjadi pergolakan di dalamnya.

Soekarno bergabung dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk bertujuan sebuah negara yang merdeka, namun upayanya mengalami berbagai hambatan mulai dari tekanan pemerintahan Belanda, hingga pendudukan Jepang di Nusantara. Sampai beliau ikut serta dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Republik Indonesia hingga tahun 1966-1967. Pada masa pemerintahan Soekarno, kondisi perpolitikan Indonesia melewati demokrasi parlementer hingga demokrasi terpimpin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keadaan politik di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca mampu mengidentifikasi apa yang terjadi pada perpolitikan Indonesia pada masa itu..

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersumber dari berbagai buku maupun artikel dengan mendeskripsikan mengenai politik Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno.

Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kualitatif juga di tafsirkan sebagai penelitian yang mengarah pada pengkajian pada latar alamiah dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi. Selain itu, kualitatif didefinisikan sebagai jalan untuk menemukan serta menggambarkan suatu peristiwa secara naratif, (Denzin & Lincoln, 1994; Nazir, 2005; Somantri, 2005 dan Creswell, 2010 dalam Kaharuddin, 2021).

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Nugrahani, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Biografi Soekarno

Soekarno merupakan seorang tokoh proklamator Indonesia, Bapak bangsa, dan penyambung lidah rakyat. Beliau merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Koesno Sosro Soekarno atau yang sering dipanggil Soekarno lahir

pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1901 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Ia merupakan putra seorang muslim dan ibu yang beragama Hindu. Ayahnya, R. Soekemi Sosrodihardjo, berasal dari keluarga pegawai priayi Jawa yang merupakan bangsawan bawah dan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, seorang putri brahmana yang bertugas di kuil Hindu. Dalam keluarga, Soekarno merupakan anak kedua dari dua bersaudara, sedangkan kakaknya yang pertama bernama Sukarmini atau yang sering dipanggil dengan sebutan Ibu Wardoyo.

Orang tua Soekarno berhasil menikah meski terdapat beberapa halangan seperti berbeda agama dan kebudayaan masing-masing. Masa kanak-kanak banyak ia habiskan di Tulungagung bersama kakeknya. Kakeknya memasukkan Soekarno ke Sekolah Dasar Desa di Tulung Agung pada usia 6 tahun, lalu dipindahkan ke Sekolah Dasar 02 di Sidoarjo. Beberapa tahun kemudian ia pun dipindahkan lagi ke sekolah 01 Mojokerto. Ia kembali dipindahkan dan dimasukkan ke sekolah "Europeese Lagere School (ELS)" Mojokerto karena kecerdasan yang dimilikinya (Hamid, 2012).

Haji Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan di sekolahkan ke *Hoogere Burger School* (HBS) pada saat Soekarno berusia 14 tahun. Saat belajar di HBS, Soekarno mulai mengenal dan mendalami jiwa nasionalisme dan kemudian melanjutkan studinya ke THS (*Technische Hooge-School*), sekarang ITB hingga meraih gelar Insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Selama menempuh pendidikan, Soekarno tidak pernah berhenti untuk menggaungkan untuk memimpikan sebuah negara merdeka. Karena aktivitasnya, Belanda menghukum Soekarno dan memenjarakannya. Namun pamornya meredup karena tekanan pemerintahan Belanda. Dan justru mendapat angin segar ketika Belanda mengalami kekalahan melawan Jepang dan berkeyakinan bahwa Jepang bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ketika masa pemerintahan kolonial Jepang, Soekarno mengajak para pemuda untuk bergabung bersama barisan *romusha*. Bersama Hatta disampingnya, Sukarno menghadapi masa-masa awal kemerdekaan yang sulit. Namun keduanya sukses menangkis tantangan serius dari dalam negeri, keresahan, bahkan pemberontakan di berbagai daerah, juga dari luar seperti agresi Belanda (Wilardjo, 2012).

Semasa hidup, Soekarno telah mempunyai tiga orang istri dan dikaruniai delapan orang anak. Dari istrinya yang pertama, Fatmawati, ia dikaruniai lima orang anak yang bernama: Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh, sedangkan dari istrinya yang kedua Hartini, ia mempunyai dua orang anak yang bernama Taufan dan Bayu dan dari istrinya yang ketiga Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto dikaruniai satu orang anak yang bernama Kartika (Hamid, 2012).

II. Kondisi Perpolitikan Indonesia pada Masa Pemerintahan Soekarno

Perpolitikan Indonesia pada masa itu didominasi oleh banyak partai politik, diantaranya adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Sjahrir. Partai ini didukung oleh para intelektual Jakarta dan berpengaruh di kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan mempunyai pendukung dari kalangan tentara pusat, namun kurang memiliki pengaruh di luar Jakarta. Selanjutnya adalah Parkindo (Partai Kristen Indonesia), arti mereka menjadi makin penting karena banyak orang-orang Kristen yang memegang jabatan tinggi di pemerintahan dan militer. Kemudian ada Masyumi, yang mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam dan dianggap sebagai partai terbesar di Indonesia pada masa itu. Basis politik Masyumi masa itu antara lain orang-orang Islam yang taat, termasuk kaum borjuis pribumi. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di daerah pedesaan Jawa, partai ini memiliki daya tarik yang besar terhadap muslim abangan dan daerah-daerah Kristen dan Hindu di luar Jawa. Partai ini adalah partai nasionalis pertama yang didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 1927. PNI didirikan sebagai wadah dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Selain partai-partai di atas, ada juga Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai lainnya yang ada pada masa itu.

Pada masa pemerintahan Soekarno, sistem presidensial yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya berubah menjadi sistem Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai akibat dari penerimaan demokrasi parlementer parlementer. Sistem parlementer yang mulai diberlakukan dua bulan sesudah kemerdekaan diproklamkan dan diperkuat dalam dengan sistem multi partai, maka dalam kurun waktu 14 tahun (1945-1959) tercatat tujuh kali terjadi pergantian kabinet, ini berarti umur rata-rata kabinet hanyalah berkisar lebih kurang 15 bulan saja, akan tetapi ada kabinet-kabinet tertentu yang mampu bertahan lebih dari 2 tahun.

Sistem Politik pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959 mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Hal ini dikarenakan menganut sistem multipartai atau lebih dari satu partai yang mencoba untuk silih berganti dalam memperoleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Di mana lembaga legislatif seperti DPR dan Parlemen memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden maupun menteri-menteri (Setiawan, dkk, 2018).

Pada masa pemerintahan Soekarno, sistem presidensial yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya berubah menjadi sistem Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. antara lain.

- a. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
- b. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
- c. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
- d. Kabinet Ali Satromidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
- e. Kabinet Burharuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
- f. Kabinet Ali Satromidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959).

Kenyataan seringnya kabinet silih berganti tersebut menimbulkan ketidakpuasan dikalangan politisi. Demikian pula pemerintahan yang tersentralisasi di Jawa banyak menimbulkan kecemburuan sosial pada bagian-bagian lain dari wilayah tanah air. Berbagai bentuk pemberontakan seperti, PRRI Permesta, Kahar Muzakar, DI/TII, Andi Azis dan Andi Selle menjadi bukti keadaan seperti itu (Irawan, 2016).

Kabinet Natsir, kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan ialah Kabinet Natsir, yang berlangsung sejak 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Kabinet ini di pimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dan didukung oleh Partai Masyumi dan ada beberapa menteri yang non partai. Pada awalnya kabinet ini merupakan kabinet koalisi, akan tetapi PNI sebagai partai terbesar kedua tidak diberikan kedudukan yang sesuai (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008: 308). Program Kabinet Natsir adalah, mengadakan Pemilihan untuk memilih Konstituante. Kedua, Memajukan pada bidang perekonomian, kesehatan, dan bidang kesejahteraan rakyat. Ketiga, Menyempurnakan pemerintahan dan militer. Terakhir, menyelesaikan masalah Irian Barat dan memulihkan keamanan serta ketertiban (Setiawan, dkk, 2018). Pada masa kabinet Natsir terjadi ketidakharmonisan antara Soekarno dengan Masyumi, yang dimana M. Natsir yang sebagai ketua Masyumi ditunjuk presiden Soekarno sebagai formatur kabinet, dan kemudian mengantarkan M. Natsir ke jabatan perdana menteri pada bulan September 1950. Ketika M. Natsir menjabat sebagai perdana menteri terjadi ketidakharmonisan dengan presiden Soekarno dikarenakan masalah Irian Barat. Karena Irian Barat tak kunjung bergabung ke Indonesia, presiden Soekarno menyarankan kepada pemerintah untuk membatalkan persetujuan KMB secara unilateral dan memberikan sanksi ekonomi kepada Belanda, namun usulan ini ditolak oleh M. Natsir, karena beliau lebih menghendaki jalur diplomasi, adanya perbedaan ini menimbulkan ketegangan antara Soekarno dengan Natsir. Ketegangan Soekarno dengan Masyumi terus berlanjut hingga dilakukan pembubaran Masyumi melalui keputusan presiden No. 200 tahun 1960 pada tanggal 17 Agustus 1960 (Siregar, 2011).

Kabinet Sukiman, di kembalikannya mandat Perdana Menteri kepada Presiden, memaksa terbentuknya kabinet baru untuk menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Kabinet kedua ini merupakan koalisi antara Partai Masyumi dan PNI, di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Program kerja Kabinet Sukiman antara lain. Pertama, bidang sosial-ekonomi mengusahakan kemakmuran bagi rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum. Kedua, bidang keamanan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Ketiga, bidang politik luar negeri menjalankan politik bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008: 308 dalam Setiawan, dkk, 2018).

Kabinet Wilopo, presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojokusarto dan Prawoto Mangkusawitu, mereka berasal dari partai PNI dan Masyumi agar membentuk kabinet yang baru, tetapi mereka yang sebagai formatur gagal menjalankan tugasnya. Maka Presiden Soekarno menunjuk Mr Wilopo dari partai PNI sebagai formatur baru dan tanggal 30 Maret 1952 Mr Wilopo mengajukan susunan kabinetnya (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1974: 215-216 dalam Setiawan, dkk, 2018). Program kerja yang ditawarkan dalam kabinet ini adalah, (1) menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR dan DPRD, (2) meningkatkan kemakmuran rakyat, (3) membebaskan Irian Barat, (4) menjalankan politik luar negeri bebas aktif (A. Kardiyat Wiharyanto, 2011: 78). Kabinet Wilopo menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, namun kabinet ini juga bertugas menghapuskan persetujuan dengan Amerika Serikat yang terjadi masa Kabinet Sukiman, dengan cara berusaha memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang kurang mengikat (M. C. Ricklefs, 2009: 508).

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, kabinet berikutnya terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1953, dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastromidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya). Di dalam kabinet ini Masyumi tidak turut serta, akan tetapi Nadhatul Ulama (NU) duduk di dalamnya. Program kerja kabinet ini sebagai berikut. Pertama, program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, serta dalam organisasi negara, pembaharuan, dan perundang-undangan. Kedua, pengembalian Irian Barat, dan terakhir, politik luar negeri bebas aktif (Ginandjar Kartasasmita, A. Prabowo dan Bambang Kesewo, 1995: 363 dalam Setiawan, dkk, 2018).

Kabinet Burhanudin Harahap, kabinet ini berlangsung antara 12 Agustus 1955-3 Maret 1956. Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap berhasil melaksanakan pemilu tanggal 29 September 1955. Pemilihan Umum sebagai sarana penting demokrasi sebetulnya sudah masuk agenda kerja kabinet parlementer pertama dibawah pimpinan Natsir, dan juga ada dalam program Kabinet Sukiman, tetapi belum sempat dilaksanakan oleh mereka keburu dijatuhkan kabinet. Baru pada era Kabinet Wilopo sebuah Rancangan Undang-undang Pemilu diajukan ke parlemen (DPRS, DPAS) dan disahkan menjadi UU (Atmadji Sumarkidjo, 2000: 71-72 dalam Setiawan, dkk, 2018).

Kabinet Ali Sastroamidjojo II, kabinet Ali II merupakan sebuah kabinet koalisi PNI-Masyumi-NU. Kabinet ini berlangsung sejak 20 Maret 1956-4 Maret 1957. Program kerja yang diusung oleh Kabinet Ali II adalah (a) pembatalan hasil perjanjian KMB, menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian yang dihasilkan Konferensi Meja Bundar secara Unilateral baik formal maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat yang dihasilkan (b) meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia Internasional dan membentuk Provinsi Irian Barat, (d) menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia, (e)

meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia-Afrika di Bandung (Ginandjar Kartasasmita, A. Prabowo dan Bambang Kesewo, 1995: 30 dalam Setiawan, dkk, 2018).

Kabinet Djuanda, kabinet Djuanda berlangsung antara April 1957-Juli 1959. Program kerja kabinet ini antara lain. Pertama, membentuk suatu Dewan Nasional. Kedua, normalisasi keadaan negara Republik Indonesia. Ketiga, melanjutkan pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar. Keempat, memperjuangkan Irian Barat. Terakhir, mempercepat pembangunan (Ginandjar Kartasasmita, A. Prabowo dan Bambang Kesewo, 1995: 42 dalam Setiawan, dkk, 2018).

Nasakom, ideologi yang lebih ditekankan pada era demokrasi terpimpin bukanlah Pancasila melainkan suatu konsep yang diberi nama Nasakom. Nasakom lebih ditekankan dalam seluruh bidang pemerintahan. Berdasar dari tiga kekuatan yang ada dengan Sukarno sebagai penyeimbangannya dapat diketahui bahwa ketiga kekuatan ini juga termaktub dalam konsep Nasakom. Nasionalisme, kekuatan politik militer. Agama, kekuatan politik Islam. Komunis, kekuatan politik PKI. Nasionalis, Agama dan Komunis atau yang kemudian disingkat Nasakom merupakan murni hasil pemikiran dari Sukarno. Ketiga ideologi ini berusaha untuk disinkretikan oleh Sukarno sehingga menjadi satu ideologi yang utuh yaitu Nasakom. Sehingga muncul sedikit perbedaan antara Nasionalisme yang berdiri sendiri, Agama yang berdiri sendiri, dan Komunisme yang berdiri sendiri dengan Nasakom. Nasakom adalah penggabungan ketiga ideologi ini yang juga merupakan perasan dari Pancasila. Nasakom sendiri sebenarnya sudah di ungkapkan oleh Sukarno muda pada tahun 1926, namun dengan nama yang berbeda yakni Nasionalis, Islamis dan Marxis. Seiring berjalannya waktu paham Nasionalis, Islamis dan Marxis terus mengalami perkembangan dan mencapai puncaknya pada era demokrasi terpimpin dengan nama Nasakom (Winata, 2017). Pada masa mudanya Soekarno telah memiliki cita-cita besar menggabungkan tiga ideologi yang saat itu sangat berpengaruh dan memiliki akar yang kuat di kalangan kaum pergerakan. Soekarno muda menuangkan gagasan "utopianya" ke dalam tulisan yang berjudul Islam, Nasionalisme dan Marxisme pada tahun 1926, tulisan itu dimuat di Suluh Indonesia Muda secara berseri. Dalam tulisannya Soekarno memandang perlunya ketiga ideologi untuk bersatu melawan imperialisme Belanda, karena untuk melawan kaum penjajah diperlukan suatu kekuatan efektif yang menghimpun semua unsur kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat (Soekarno, Islam, Nasionalisme, Marxisme, 2000 dalam Argenti, dkk, 2017).

Pada masa pemerintahan Soekarno, sistem presidensial yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya berubah menjadi sistem Undang-Undang Dasar Sementara 1949-1950, ternyata kurang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Lahirnya demokrasi terpimpin dikarenakan adanya rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, kemudian ketidak mampuan demokrasi parlementer mewujudkan amanat penderitaan rakyat (Hamid, 2012). Yang menjadi ciri khas dari periode ini ialah dominasi yang kuat dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik. Di demokrasi terpimpin juga muncul yang namanya Nasakom. Demokrasi terpimpin pun akhirnya berakhir setelah adanya gerakan 30 September dan surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

KESIMPULAN

Soekarno, tokoh proklamator dan presiden pertama Indonesia, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Berasal dari latar belakang keluarga dengan perbedaan agama dan budaya, ia menghabiskan masa kecilnya di Tulungagung dan bersekolah di beberapa tempat sebelum akhirnya masuk ke *Hoogere Burger School* (HBS) di Surabaya atas ajakan Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di *Technische Hooge-School* (sekarang ITB) dan aktif menggaungkan semangat kemerdekaan, meskipun harus menghadapi hukuman dari pemerintah kolonial Belanda. Dengan kehadiran Jepang, Soekarno melihat peluang kemerdekaan Indonesia yang akhirnya terwujud. Dalam kehidupan pribadinya, Soekarno menikah dengan tiga wanita dan memiliki delapan anak.

Masa pemerintahan Soekarno ditandai oleh dinamika politik yang kompleks dengan banyak partai politik yang berpengaruh, termasuk PSI, Parkindo, Masyumi, PNI, dan PKI. Awalnya, Indonesia mengadopsi sistem parlementer yang sering mengalami pergantian kabinet, mencerminkan ketidakstabilan politik. Seringnya pergantian kabinet dan pemberontakan di berbagai daerah mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan politisi. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) yang mengusung sistem multipartai memperburuk situasi, memaksa Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menggantikan sistem parlementer dengan Demokrasi Terpimpin. Selama Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengembangkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan politik yang ada dalam melawan imperialisme dan mencapai cita-cita proklamasi. Era ini ditandai oleh dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, meningkatnya pengaruh komunis, dan peran ABRI yang lebih besar. Demokrasi Terpimpin berakhir setelah peristiwa Gerakan 30 September dan Supersemar pada tahun 1966.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga ucapkan terimakasih yang mendalam kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yaitu Bapak Ahmad Fu'adin, S.Pd., M.Pd, yang dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan bimbingan telah memberikan arahan serta saran yang sangat berharga selama proses pengerjaan artikel ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas

Pendidikan Indonesia (UPI), khususnya kepada Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan selama proses penyusunan artikel ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan teknis selama proses pengerjaan artikel ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kontribusinya. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, K. S. (2022). Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966. *Jurnal Candra Sangkala*.
- Gili Argenti, D. S. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 23.
- Hamdan, H. (2012). Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin). 19-67.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 54-63.
- Johan Setiawan, W. I. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950- 1959. *Jurnal Historia*, 366-376.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif : Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* , 2.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* . Solo : Cakra Books.
- Ricklefs, M. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
- Siregar, I. F. (2011). Dinamika Demokrasi di Indonesia Masa Orde Lama: Studi Kasus Antara Sukarno Versus Masyumi. *Paramita: Historical Studies Journal*, 25-35.
- Tabroni, R. (2015). *Komunikasi Politik Soekarno*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media .
- Wilardjo, S. B. (2012). Soekarno : Suatu Tujuan Perspektif Sejarah Dan Perilaku Organisasi. *Majalah Ekonomi dan Bisnis* , 1-12.
- Winata, L. (2017). Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959 - 1965. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 728-735.